

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data Penelitian**

##### **1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Kebumen**

Kabupaten Kebumen berada di dalam wilayah provinsi Jawa Tengah, dan terletak pada bagian selatan. Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di sebelah utara, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Purworejo di sebelah timur.

Letak Kabupaten Kebumen pada peta adalah antara  $7^{\circ}$  sampai  $8^{\circ}$  lintang selatan dan  $109^{\circ}$  –  $110^{\circ}$  bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,5 hektar atau 1.285,115 kilometer persegi. Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan, 1930 Rukun Warga (RW) dan dibagi menjadi 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Sementara ini, penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2008 berdasarkan proyeksi penduduk mencapai 1.242.437 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Kebumen pada tahun 2008 adalah 969 jiwa tiap  $\text{km}^2$ . Daerah Kabupaten Kebumen di bagian utara berupa perbukitan terutama di Kecamatan Sadang, Karangsembung, Sempor, dan Alian, sedangkan di bagian selatan pada umumnya berupa dataran rendah, kecuali di beberapa tempat di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Ayah (Sumber: Data Pemerintah Kebumen, 2008).

## 2. Deskripsi Wilayah Desa Setrojenar

Penelitian ini dilakukan di Desa Setrojenar. Dimana Desa Setrojenar merupakan salah satu desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang terletak di pesisir pantai selatan. Desa Setrojenar terdiri dari enam Dukuh yaitu Dukuh Duren, Dukuh Cengkerek, Dukuh Godi, Dukuh Kepek, dan Dukuh Kuang.

Berdasarkan peta Adminstratif Desa Setrojenar skala 1 : 20.000, letak astronomis Desa Setrojenar adalah antara  $7^{\circ}45'50''$  LS –  $7^{\circ}47'12''$  LS dan  $109^{\circ}39'20''$  BT –  $109^{\circ}41'00''$ . Jarak Desa Setrojenar dengan suatu pemerintah kecamatan adalah 0,5 kilometer dan jarak dari Ibukota Kabupaten Kebumen adalah 12 kilometer. Luas Desa Setrojenar yaitu 252,827 hektar. Terdiri dari 184,185 ha ladang/tegal dan pemukiman seluas 68,642 ha. Selebihnya ada 16,301 ha tanah Kas Desa, lapangan 1,392 ha dan lainnya 16,140 ha.

Batas Wilayah Desa Setrojenar yaitu:

Sebelah utara : Desa Bocor, Desa Walyo, Kecamatan Buluspesantren

Sebelah timur : Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren

Sebelah selatan : Samudera Hindia

Sebelah barat : Desa Ayam Putih, Kecamatan Buluspesantren (Sumber: Monografi Desa Setrojenar 2010).

### 3. Karakteristik Demografi

#### a. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah seluruh penduduk Desa Setrojenar adalah 2875 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1446 jiwa dan sisanya perempuan 1429 jiwa, terhimpun 760 KK. Di Desa Setrojenar, jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari pada penduduk laki-laki tetapi perbandingannya hampir seimbang (Sumber: Monografi Desa Setrojenar 2010).

#### b. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk Desa Setrojenar menurut Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan                   | Jumlah (jiwa) | Presentase |
|----|--------------------------------------|---------------|------------|
| 1. | Pendidikan Dasar (SD, SM)            | 1052          | 57,63      |
| 2. | Pendidikan Menengah (SMA)            | 674           | 39,70      |
| 3. | Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana) | 56            | 2,67       |
|    | Jumlah                               | 1782 jiwa     | 100 %      |

*Sumber : Monografi Desa Setrojenar 2010*

Dari tabel 1 diatas, diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Setrojenar sebagian besar adalah pendidikan Dasar (57,63 persen), kemudian pendidikan Menengah (39,70 persen), dan sebagian kecil adalah pendidikan Tinggi (2,67 persen). Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan karena keterbatasan biaya dan

mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Setrojenar lebih memilih tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat Desa Setrojenar memilih untuk bekerja sebagai petani. Hal ini yang menyebabkan masyarakat mempertahankan lahan yang digunakan sebagai pertanian. Karena penghasilan utama masyarakat Desa Setrojenar adalah hasil pertanian yang dikelola di lahan tersebut.

**c. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Mata Pencaharian**

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, baik sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Komposisi penduduk Desa Setrojenar berdasarkan mata pencaharian dapat digolongkan seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2. Komposisi Penduduk Desa Setrojenar Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok**

| No     | Mata Pencaharian | Jumlah     |
|--------|------------------|------------|
| 1.     | Petani           | 1269 orang |
| 2.     | Buruh tani       | 281 orang  |
| 3.     | Buruh swasta     | 194 orang  |
| 4.     | Pegawai negeri   | 45 orang   |
| 5.     | Pengrajin        | 94 orang   |
| 6.     | Pedagang         | 73 orang   |
| 7.     | Peternak         | 13 orang   |
| 8.     | Montir           | 6 orang    |
| 9.     | Polri/ABRI       | 15 orang   |
| 10     | Perangkat desa   | 14 orang   |
| Jumlah |                  | 2004 orang |

*Sumber : Monografi Desa Setrojenar Tahun 2010*

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Setrojenar bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan karena desa Setrojenar memiliki kondisi lahan yang memang mendukung untuk pertanian serta lahan yang luas menyebabkan masyarakat mempertahankan hak kepemilikan tanah dan menginginkan tanah tersebut sebagai tanah pertanian.

#### **4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk**

Masyarakat Desa Setrojenar sebagian besar adalah memeluk agama Islam yang patuh dan taat beribadah serta saling menghargai antar sesama pemeluk. Di Desa Setrojenar memiliki tempat beribadah berupa musholah dan masjid. Berdasarkan demografi Desa Setrojenar pada tahun 2010 sebagian besar yang memeluk agama Islam yaitu 2875 orang.

Di Desa Setrojenar, rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani. Berdasarkan data demografi Desa Setrojenar, hasil tanaman pangan yang terbanyak adalah tanaman jagung yaitu 80 hektar menghasilkan 5,6 ton/ha, tanaman padi 40 hektar menghasilkan 3 ton/ha, tanaman semangka 20 hektar menghasilkan 18 ton/ha, tanaman cabai 10 hektar menghasilkan 35 ton/ha, tanaman kedelai 5 hektar menghasilkan 1,5 ton/ha. Total Keluarga petani desa Setrojenar yang memiliki lahan ada 649 KK. 624 KK diantaranya memiliki lahan dibawah 0,5 ha, hanya ada 25 KK yang kepemilikan lahannya antara 0,5 hingga 1 ha. Di luar itu masih ada 71 KK petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Ketiadaan lahan telah menjadi problem nyata bagi banyak keluarga petani penggarap atau buruh tani ini (Sumber: Monografi Desa Setrojenar 2010).

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Deskripsi Umum Informan**

#### **a. Mas An (Nama samaran)**

Mas An merupakan warga desa Setrojenar tepatnya di daerah Dukuh Kepek. Ia sudah lama tinggal di desa tersebut semenjak 23 tahun yang lalu, sudah dari kecil dia tinggal di desa Setrojenar.

Banyak informasi yang dapat digali dari mas An ini, karena dia merupakan orang yang berperan aktif dalam pembelaan tanah milik warga tersebut. Mas An ini juga ikut dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah ini dan untuk mencari penyelesaian yang tepat dalam mengatasi masalah ini.

b. Bapak Sg

Bapak Sg merupakan warga asli Desa Setrojenar, tepatnya tinggal di dukuh Godi. Bapak Sg berumur 36 tahun, ia tinggal bersama istri dan satu anak perempuan yang masih kecil. Ia bekerja sebagai petani sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Bapak Sg selain bekerja sebagai petani beliau juga sebagai aktifis di LBH Phakis. Beliau ikut dalam lembaga ini untuk membela warganya tentang hak kepemilikan tanah. Banyak sekali informasi yang didapat dari bapak Sg ini, karena beliau tau tentang sejarah awal mula terjadinya masalah ini. Pada saat ada perkumpulan dengan Bupati, kepala Kodim, ketua Dislitbang, serta perwakilan masyarakat untuk membahas tentang masalah kejelasan hak kepemilikan tanah yang memang itu milik warga Setrojenar, bapak Sg mengikutinya.

c. Bapak Im

Bapak Im merupakan warga asli Desa Setrojenar, tepatnya tinggal di dukuh Godi. Bapak Im berumur 38 tahun, ia bekerja sebagai petani dan sebagai guru ngaji di desanya. Ia memiliki istri dan 3 anak perempuannya. Bapak Im juga sebagai korban pada saat terjadi konflik ada tanggal 16 April 2011. Ia ditangkap oleh TNI dan hampir dipukuli oleh TNI. Tidak hanya itu saja beliau juga kehilangan motornya karena dirusak oleh TNI.

d. Bapak Pr

Bapak Pr ini tinggal di desa Setrojenar sudah sejak kecil. Tetapi pada saat dewasa beliau merantau untuk mencari kerja. Setelah menikah beliau menetap lagi di Desa Setrojenar dan bekerja sebagai petani. Sekarang umur bapak Pr 40 tahun. Bapak Pr juga memiliki tanah di sekitar tempat yang dijadikan sebagai tempat latihan oleh TNI. Kadang tanamnya rusak akibat tanahnya digunakan untuk tempat latihan militer.

e. Bapak Nr

Bapak Nr adalah warga Desa Setrojenar. Ia hanya lulusan SMA (Sekolah Menengah Akhir). Bapak Nr tinggal di dukuh Kepek bersama anak dan istrinya. Sekarang ia berumur 40 tahun. Ia adalah mantan kepala desa di Desa Setrojenar. Setelah tidak menjabat sebagai kepala desa, ia bekerja sebagai petani. Pada saat ia sebagai kepala desa, masalah ini sudah muncul dan sampai sekarang belum menemukan titik temu yang pas.

f. Bapak Sp

Bapak Sp merupakan Kepala Desa Setrojenar. Beliau tinggal bersama istri dan satu anaknya. Beliau Sehari-hari ia bekerja di kantor kelurahan untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai aparat desa, Sp mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Selain bekerja sebagai kepala desa, beliau juga sebagai petani di Desa Setrojenar. Tidak hanya itu saja, beliau juga sebagai

korban penembakan pada saat terjadinya konflik.

g. Bapak Wd

Bapak Wd adalah seorang kepala Dislitbang, beliau berumur 40 tahun. Beliau asli dari Kebumen, tinggal bersama istri dan dua orang anaknya. Penempatan kerjanya sebagai kepala Dislitbang sejak tahun 2009. Banyak sekali informasi yang didapat dari bapak Wd, tentang masalah perebutan lahan ini.

h. Bapak Mt

Bapak Mt adalah seorang anggota TNI AD (Tentara Nasional Indonesia) di Korem wilayah Desa Setrojenar, berumur 39 tahun. Banyak informasi yang didapatkan tentang akar masalah yang terjadi mengapa terjadi bentrokan antara TNI dengan warga Desa Setrojenar.

## **2. Pembahasan dan Analisis**

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soejono Soekanto, 2006: 91). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, konflik perebutan lahan antar masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar merupakan bentuk konflik vertikal. Alasannya karena ada perbedaan tingkat kekuasaan yang dimiliki antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak TNI memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang hanya rakyat biasa.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik untuk menganalisis konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI terjadi karena masyarakat ingin mempertahankan hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat serta adanya pengklaiman yang dilakukan oleh TNI terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Konflik yang terjadi mengakibatkan banyak korban. Tercatat beberapa warga masyarakat Desa Setrojenar yang menjadi korban kebrutalan TNI yaitu ada yang terkena luka tembak, luka pukul serta kerusakan sepeda motor yang dilakukan oleh pihak TNI. Adapun data mengenai konflik yang terjadi, pada peneliti tentang faktor penyebab terjadinya konflik, dampak konflik bagi masyarakat serta upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sebagai berikut:

**a. Kronologi Konflik antara Masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI  
(Tentara Nasional Indonesia)**

Menurut Fisher *et al* (2001), menyatakan bahwa kronologi konflik disebut juga sebagai urutan kejadian dimana merupakan suatu alat bantu yang dipergunakan untuk menunjukkan sejarah suatu konflik berdasarkan daftar waktu kejadiannya (tahun, bulan/hari, sesuai skalanya) yang ditampilkan secara berurutan. Alat bantu ini dapat menjadi "*starting point*" dalam memahami dan mengungkap konflik karena dapat mengidentifikasi interpretasi berbagai pihak terhadap suatu kejadian. Interpretasi ini dapat berasal dari satu pihak atau pihak

lain yang nantinya digunakan untuk kepentingan sendiri atau bersama dengan pihak lain.

Konflik ini mulai terjadi pada tahun 2002, masyarakat sudah menyadari dan mulai berani untuk memprotes kegiatan latihan militer. Pada tahun 2009 tepatnya pada tanggal 14 Maret diadakan pertemuan, yang dihadiri oleh Wakil Pemkab Kebumen, DPRD Kabupaten Kebumen, Wakil Dislitbang TNI AD, Komandan Kodim 0709 Kebumen, Kapolres Kebumen, dalam pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi terhadap TNI untuk tidak melakukan kegiatan apapun di kawasan Urutsewu sebelum ada penyelesaian secara permanen.

Pada tahun 2010, adanya Raperda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang berisikan kawasan Urutsewu sebagai kawasan pertahanan dan keamanan membuat para petani geram dan mendatangi DPRD untuk meminta kejelasan. Pada saat itu belum terjadi bentrok antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI, masih bersifat unjuk rasa/demo untuk menyampaikan aspirasinya.

Pada 2011 terjadi konflik antara masyarakat dengan TNI terjadi bentrok/kontak fisik. Sebelumnya pada tanggal 23 Maret 2011 warga Desa Setrojenar melakukan pertemuan, membahas tentang status sengketa tanah dengan DPRD Kebumen. Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh pihak TNI AD. Hasil pertemuan tersebut adalah pernyataan lisan DPRD bahwa selama belum diambil keputusan lebih lanjut, TNI tidak diperbolehkan mengadakan latihan tempur di wilayah

yang di persengketakan itu. Pada awal April, pihak dari Pemerintah Desa mendapat surat pemberitahuan bahwa tanggal 11 April 2011 akan dilakukan latihan. Tanggal 10 April 2011 TNI dari Yogyakarta sudah datang, hal ini menyebabkan masyarakat marah dan melakukan blokade karena menganggap TNI melanggar keputusan yang sudah disepakati sebelumnya (Suara Keadilan, 2011: 19-20).

Kronologi serangan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan warga Desa Setrojenar (pada tanggal 16 April – 17 April 2011) sebagai berikut:

**Tabel 3. Kronologi konflik antara masyarakat Desa Setrojenar TNI pada tanggal 16-17 April 2011**

| Waktu kejadian        | Keterangan   |
|-----------------------|--|
| Sabtu, 16 April 2011  | <p>Pukul 09.30 WIB : Sekitar 30 orang warga yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan mengadakan ziarah kubur ke makam 5 anak yang menjadi korban ledakan mortir pada tahun 1997.</p> <p>Pukul 12.00 WIB : TNI membongkar blokade yang dibuat oleh warga. Blokade tersebut dibuat beberapa titik, pada tanggal 11 April 2011 dari pohon waru dan kayu-kayu. Di luar dugaan, ternyata TNI menyerbu ke arah warga dengan tembak-tembakan. Warga yang panik kemudian tercerai berai lari. Selanjutnya terjadi aksi-aksi pemukulan oleh para tentara. Tidak hanya sampai di situ, TNI juga mengejar dan melakukan penyisiran (sweeping).</p> <p>Pukul 15.00 WIB: TNI melakukan penangkapan terhadap warga dan tokoh, diantaranya Nur Hidayat (39), Muhajir (30), Paryono (39), Solekhudin (19), Marifun (31), Imam (36).</p> <p>Pukul 15.00-17.00 WIB: TNI menyisir rumah-rumah warga di Desa Setrojenar. Warga tidak ada yang berani keluar. Beberapa warga dianiaya.</p> |
| Minggu, 17 April 2011 | <p>Pukul 10.30-18.30 WIB: Polisi menangkap kembali 4 warga Desa Setrojenar yaitu Johan, Adi Waluyo, Solehan dan Yono. Sehingga pada tanggal 17 April 2011 sudah 10 warga yang diperiksa oleh Polisi.</p> <p>Pada pukul 18.28 WIB: Ada 7 warga yang berstatus saksi diperbolehkan untuk pulang yaitu Hidayat bin Muchdin (39), Muhajir bin Saia (30), Paryono bin Dullah Afandi (39), Solekhudin bin Sadir (19), Marifun bin Jumain (31), Imam Zuhdi bin Muh Samidja (36), sedangkan 3 warga ditetapkan sebagai tersangka.</p>  |

(Sumber: bapak Sg, wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 12.30 WIB)

**b. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Konflik antara Masyarakat dengan TNI di desa Setrojenar**

Faktor penyebab konflik sangat banyak sekali, seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor penyebab konflik ada empat yaitu perbedaan antar individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sama seperti yang dikatakan oleh Soerjono, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di Desa Setrojenar, pemerintah setempat, dan pihak TNI juga, dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI. Ada faktor internal dan eksternal penyebab munculnya konflik perebutan lahan yang terjadi di Desa Setrojenar. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Faktor Intern Penyebab Konflik Perebutan Lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia)**

Faktor intern merupakan faktor yang terjadi dari dalam individu maupun kelompok yang berkonflik. Seperti halnya yang terjadi pada konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Terdapat beberapa faktor intern yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut, sebagai berikut:

**(a) Status Kepemilikan dan Batas tanah yang tidak jelas**

Tidak adanya kejelasan tentang status kepemilikan tanah dan batas tanah menjadi faktor penyebab terjadinya konflik

perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas menimbulkan masing-masing pihak melakukan pengklaiman terhadap tanah tersebut. Warga Desa Setrojenar mengklaim tanah tersebut milik mereka dan mereka mempunyai bukti-bukti surat tanah atas kepemilikan lahan di sepanjang pantai yang berada di wilayah Kecamatan Mirit, Ambal dan Kecamatan Bulupesantren. TNI-pun tidak mau kalah dengan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik mereka. Anggapan TNI menganggap tanah sepanjang pantai itu sebagai tanah negara yang diperuntukkan bagi lahan latihan pertahanan dan keamanan TNI Angkatan Darat.

Seperti yang dikatakan oleh mas An, yaitu “warga sini memiliki bukti atas kepemilikan tanah berupa C desa mbak. Kalau dulu itu SPPT mbak atau petuk” (Wawancara pada tanggal 12 Mei 2012, pukul 16.30 WIB). Dari pihak TNI juga sama mengaku bahwa tanah tersebut milik TNI dengan bukti SHNo 4/1994, dimana dasar hukum kepemilikan lahan itu adalah penyerahan tanah oleh KNL pada tanggal 25 Juni 1950, dan Keppres No 4/1960 tentang semua rampasan perang yang dikuasai Negara dan dibagi-bagi sesuai departemennya. Dasar hukum lain berupa Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara pada Denzibang 1/IV Yogyakarta nomor:

012.22.035.044E02.000. KP dan periode semester II tahun anggaran 2010 nomor: BA.SMT2-002.TNI/WKN.09/KNL.06/2011, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Seperti yang dikatakan bapak Wd, pada saat wawancara yaitu:

“Para TNI latihan dikawasan ini sudah sejak tahun 1949, dari pihak kami memiliki surat bukti SHNo 4/1994, Keppres No 4/1960 tentang semua rampasan perang yang dikuasai Negara dan dibagi-bagi sesuai tempatnya, dan surat izin dari Bupati bahwa kami boleh mengadakan latihan uji coba senjata di Desa Setrojenar ini mbak” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012, pukul 10.00 WIB).

Status kepemilikan dan batas tanah menyebabkan pengklaiman dilakukan oleh masing-masing pihak. Ini menjadi faktor terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI. Kedua belah pihak merasa memiliki surat keterangan yang legal dan sah sebagai pemilik sah pengguna lahan tersebut. Setelah ditelusuri di BPN Kebumen ternyata tanah yang memiliki sertifikat tersebut hanya berupa mess atau bangunan dislitbang dan yang milik masyarakat juga berupa bangunan yang berlantai tiga, selebihnya adalah tanah negara.

(b) Tanaman pertanian milik masyarakat rusak akibat latihan militer

Latihan militer yang dilaksanakan di Desa Setrojenar menimbulkan kerusakan tanaman milik warga Desa Setrojenar.

Tidak hanya itu saja kegiatan pertanian juga terhambat karena adanya latihan militer. Dari pihak TNI yang ada di dislitbang tidak memberikan ganti rugi sama sekali terhadap tanaman yang rusak akibat latihan militer. Seperti yang dikatakan oleh bapak Pr:

“ Pada saat latihan militer, tanaman kita rusak mbak. Terus masyarakat harus memberikan uang kepada pihak dislitbang agar tanamannya tidak rusak mbak pada saat latihan militer. Sambil kita ngasih uang ke pihak TNI kita juga bilang mbak, tanamannya jangan dirusak gitu mbak”. (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2012, pukul 10.24 WIB).

Tanaman yang rusak dan lahan pertanian yang semakin kecil menjadi faktor penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar. Inilah yang membuat masyarakat desa Setrojenar menolak adanya latihan militer. Tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh pihak Dislitbang TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) terhadap tanaman pertaniannya yang dirusak.

Di perkuat lagi dengan perkataan Bapak Im sebagai berikut:

“Pihak TNI kalau latihan itu seenaknya saja mbak. Orang ada tanaman ya diinjek saja tanamannya. Jadinya ya tanaman rusak, tidak diberi ganti rugi lagi. Terus mengganggu kegiatan pertanian mbak, pada saat itu Bapak Nr mau menyiram semangka dilarang oleh TNI. Padahal semangka kan membutuhkan penyiraman setiap hari. Jadi warga diberi waktu untuk menyiram tanaman itu malam hari mbak.” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 12.20 WIB).

Berbeda dengan yang dikatakan oleh warga, dari pihak TNI sendiri mengatakan bahwa tanaman yang dirusak diganti oleh TNI. Seperti yang dikatakan bapak Wd bahwa:

“Kami latihan dikawasan ini sudah lama, dan tanaman yang rusak dari pihak kami menggantinya. Tidak hanya itu saja, pihak kami juga membiarkan warga Desa Setrojenar menanam tanaman hortikultura di area sekitar latihan. Dari dulu kita hidup berdampingan tidak ada masalah, ketika ada masalah bentrok pada saat tanggal 16 April 2012 saya kaget juga dan diluardugaan mbak.”

Tanah di Desa Setrojenar memang sangat penting sekali, karena itu merupakan sebagai kegiatan pertanian dengan ditanami berbagai macam jenis tanaman. Karena sebagian besar penduduk Desa Setrojenar adalah petani maka mereka melakukan tindakan untuk menolak adanya latihan militer. Kawasan Desa Setrojenar jika dijadikan sebagai kawasan untuk latihan militer maka akan mengganggu aktivitas pertanian yang ada di Desa Setrojenar. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nr, bahwa: “Masyarakat kurang bebas beraktivitas terutama dalam kegiatan pertanian dan peternakan mbak”.

(c) Perbedaan tujuan atau kepentingan dari masing-masing pihak

Masing-masing yang berkonflik memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Pihak dari masyarakat menginginkan tanahnya dijadikan sebagai tempat untuk pertanian dan pariwisata. Sedangkan dari pihak TNI dan pemerintah daerah menginginkan tanah tersebut untuk kawasan pertahanan dan

untuk latihan militer.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat Desa Setrojenar milih untuk bekerja sebagai petani. Sekitar 1269 orang di Desa Setrojenar bermatapencaharian sebagai petani, selebihnya sebagai buruh swasta. Hal ini menyebabkan masyarakat mempertahankan lahan yang digunakan sebagai pertanian. Karena penghasilan utama masyarakat Desa Setrojenar adalah hasil pertanian yang dikelola di lahan tersebut. Sehingga masyarakat berjuang untuk mempertahankan lahan yang dijadikan sebagai latihan militer.

Dalam pandangan Dahrendrof, konflik kepentingan menjadi fakta tak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan (dalam Novri Susan, 2009: 49-50). Sama yang terjadi pada konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI yaitu perbedaan tujuan atau kepentingan dalam pemanfaatan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI menjadi fakta yang paling penting sebagai penyebab terjadinya konflik. Masyarakat Desa Setrojenar menginginkan lahan tersebut sebagai lahan pertanian dan pariwisata. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sg sebagai berikut:

“Saya dan warga desa disini menginginkan lahan tersebut sebagai kawasan pertanian mbak. Karena pertanian merupakan sumber penghidupan kami. Kalau lahan tersebut dijadikan kawasan latihan militer kami mau hidup dari

mana mbak, warga disini rata-rata bekerja sebagai petani.” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pada pukul 12.20 WIB).

Dari pihak TNI menginginkan lahan tersebut dijadikan sebagai lahan untuk latihan militer. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mt bahwa: “kawasan disini sangat strategis mbak, untuk tempat latihan uji coba senjata.” (Wawancara pada tanggal 7 Juli 2012, pada pukul 10.30 WIB).

Perbedaan tujuan atau kepentingan dalam pemanfaatan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI merupakan faktor penyebab terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Menurut Soerjono Soekanto tentang faktor penyebab konflik, maka perbedaan tujuan ini termasuk dalam faktor penyebab konflik pada perbedaan kepentingan, yaitu masing-masing memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri, dari pihak masyarakat Desa Setrojenar memiliki kepentingan ingin menjadikan lahan tersebut sebagai lahan pertanian dan pariwisata sedangkan dari pihak dislitbang TNI AD menginginkan sebagai lahan untuk latihan militer karena tempatnya yang strategis dan luas.

Dahrendrof mengatakan bahwa masyarakat yang cenderung berkonflik agar perubahan sosial terjadi. Kelompok konflik dipicu oleh kepentingannya. Kelompok konflik dalam Terkait dengan teori Dahrendrof yang memandang konflik dengan tiga

tipe besar kelompok, yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 156). Masyarakat yang memicu terjadinya konflik karena menginginkan perubahan dimana lahan yang dijadikan sebagai latihan militer diganti sebagai lahan pertanian dan pariwisata. Kelompok semu dalam konflik ini yang terjadi di Desa Setrojenar adalah TNI yang memiliki kepentingan untuk latihan militer dan melakukan uji coba senjata dan kegiatan ini dianggap wajib untuk dilakukan di daerah Setrojenar. Kelompok kepentingan dalam konflik ini adalah TNI yang memiliki kepentingan untuk latihan militer dan melakukan uji coba senjata serta masyarakat Desa Setrojenar yang memiliki kepentingan untuk pertanian. Kelompok konflik dalam konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI adalah warga Desa Setrojenar dan TNI.

**2) Faktor Eksternal Penyebab Konflik Perebutan Lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yaitu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kebumen.**

Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang dari awal sudah ditolak oleh masyarakat Desa Setrojenar. Kebijakan Pemkab tersebut berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta

terkait dengan persetujuan Pemkab terhadap adanya penambang pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang Jakarta di kawasan Pantai Urutsewu. Kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berisi tentang dijadikannya kawasan Pantai Urutsewu sebagai kawasan Pertahanan dan Latihan Militer. Seperti yang dikatakan bapak Sg, sebagai berikut:

“Tanah sini dijadikan untuk latihan militer maka secara spontan akan merubah status kepemilikan yang sudah dimiliki oleh warga sejak dulu. Kalau seperti itu jadi 0 lagi status kepemilikan tanahnya mbak, kalau adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Padahal masyarakat menginginkan tanah tersebut sebagai kawasan wisata dan pertanian .” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 11.45 WIB).

Munculnya rencana proyek pembangunan JLSS (Jalan Lintas Selatan Selatan) juga menjadi penyebab memanasnya situasi masalah tersebut. Adanya proyek JLSS (Jalan Lintas Selatan Selatan) akan menghilangkan aset tanah milik warga. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nr sebagai berikut:

“Pada saat adanya rencana pembangunan JLSS, kan warga disini yang tanahnya dijadikan sebagai JLSS mendapat ganti rugi dari Pemkab. Waktu itu pihak Bina Marga sedang melakukan pemasangan patok untuk area mana saja yang akan dijadikan sebagai JLSS (Jalan Lintas Selatan Selatan) dan TNI juga tiba-tiba memasang patok dan meminta ganti rugi terhadap Pemkab mbak.” (Wawancara pada tanggal 31 Mei, pukul 11.36 WIB, dirumah bapak Nr ).

Kebijakan dan peraturan daerah berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu faktor terjadinya konflik penggunaan lahan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, menurut

Soerjono Soekanto salah satu bentuk konflik adalah pertentangan antar kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang terjadi karena perbedaan kepentingan yaitu antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI. Seperti halnya yang terjadi pada konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI, masing-masing pihak memiliki kepentingannya. Tidak hanya itu, ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dalam masalah ini. Lahan yang digunakan tidak hanya sebagai latihan militer saja, tetapi ada juga pihak yang menginginkan adanya penambangan pasir di daerah tersebut. Apabila diijinkannya penambang pasir besi tersebut yaitu pihak TNI mendapatkan uang dari pihak penambang pasir besi tersebut.

Menurut pendapat Pruitt dan Rubin tentang definisi konflik yaitu sebagai sebuah persepsi mengenai kepentingan atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Pruitt dan Rubin, 2009: 9). Sama seperti konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI yang merupakan konflik kepentingan dalam artian masing-masing pihak memiliki kepentingannya masing-masing. Pihak dari petani memiliki kepentingan bahwa kawasan tersebut sebagai kawasan pertanian dan pariwisata, sedangkan dari pihak lain seperti Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yaitu sebagai kawasan latihan

militer serta sebagai kawasan penambangan pasir besi. Aspirasi dari pihak yang berkonflik belum menemui titik temu yang pas dan sepadam.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk kawasan Desa Setrojenar seharusnya lebih dipikirkan kembali dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Setrojenar. Jika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disahkan oleh Pemerintah maka akan merugikan masyarakat Desa Setrojenar. Dimana sebagian besar masyarakat Desa Setrojenar adalah petani, jika lahan yang digunakan untuk pertanian digunakan untuk latihan militer. Maka masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau Rencana Tata Ruang Wilayah disahkan maka kebijakan yang menjadikan kawasan Setrojenar sebagai kawasan pertahanan dan sebagai kawasan latihan uji coba senjata itu ditiadakan atau dihapus. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini harus memikirkan semua pihak, jangan memikirkan satu pihak saja karena akan merugikan dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pihak Pemerintah harus lebih memikirkan kembali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama.

Adanya konflik perebutan lahan membuktikan bahwa penataan ruang di Indonesia masih belum jelas atau masih carut marut. Di dalam undang-undang No 26 tahun 2007 dijelaskan bahwa penataan ruang termasuk juga dalam penataan Kawasan

Latihan Militer harus melihat pada kepentingan umum dan kepentingan masyarakat terutama menjamin pada perlindungan mereka. Kejelasan dalam status kepemilikan tanah memang sangat penting, agar tidak terjadi konflik seperti di Kebumen ini. Selain itu, juga harus berlandaskan hukum yang mempertimbangkan rasa keadilan serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak. Di dalam undang-undang tersebut juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti tata guna lahan, penetapan zoning, serta melihat pada kondisi sosial dan budaya yang ada pada masyarakat.

### **c. Upaya Penyelesaian**

Upaya penyelesaian konflik dalam konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, pihak-pihak lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa dialog saja dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada titik temu yang pas untuk menyelesaikan masalah ini. Masing-masing pihak mempertahankan aspirasinya bahwa tanah itu milik TNI maupun milik masyarakat. Pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hanya berupa dialog tetapi belum ada keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nr sebagai berikut:

“Upaya pemerintah ada tapi agak sedikit ragu, ketika kita bicara wewenang terkait dengan masalah TNI. Jadi kaya gini mbak, ada saat kita membahas masalah ini, dan berbicara wewenang dari pihak pemerintah mengatakan tidak ada

wewenang, jadi masih mengambang tidak ada kejelasan.”  
(wawancara pada tanggal 31 Mei 2012, pukul 11.36 WIB).

Penjelasan dari bapak Nr dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini belum ada kejelasan. Dari pihak pemerintah belum berani memutuskan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Masih ragu untuk mengambil keputusan, karena dari masing-masing pihak ada yang pro dan ada yang kontra. Menyebabkan masalah tersebut sulit untuk diselesaikan. Upaya memang sudah dilakukan beberapa kali seperti yang dikatakan oleh bapak Im sebagai berikut:

“Sebelumnya pada tahun 2002 sudah melakukan dialog dengan TNI tetapi tidak ada kesepakatan. Terus pada tahun 2007 melakukan audiensi kedewan BPN menyatakan bahwa TNI tidak memiliki tanah di daerah Setrojenar tetapi ketika masalah ini muncul pihak BPN mengatakan kalau masyarakat tidak memiliki bukti terhadap kepemilikan tanah. Pada tahun 2009 melakukan dialog dengan Bupati, komandan dislitbang, dan masyarakat tentang penyelesaian yang tepat. Pada saat itu masyarakat meminta kejelasan tentang hak kepemilikan tanah serta masyarakat meminta tidak ada latihan militer di daerah ini apabila belum ada kejelasan. Oleh pihak Bupati sudah disetujui tetapi kenapa malah TNI memaksa untuk latihan.”  
(wawancara pada 29 Mei 2012, pukul 12.20 WIB).

Melihat hasil wawancara dari bapak Im dapat dikatakan bahwa masih belum ada kejelasan yang tepat terhadap kepemilikan tanah. Pemerintah daerah tidak tegas dalam mengatasi masalah tersebut. Dari pihak TNI juga sudah mengadakan perundingan dengan masyarakat desa Setrojenar, seperti yang dikatakan oleh bapak Wd sebagai berikut:

“Dari pihak kami sudah mengadakan perundingan dengan masyarakat sini mbak, tapi masyarakat malah melakukakn

kebrutalan dengan merobohkan papan gapura dislitbang yang ada di depan dan merusak gudang senjata milik kami mbak". Walaupun sudah mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak tetapi tidak ada kesepakatan, itu sama saja. Apabila penyelesaian masalah tersebut tidak ada pihak ke tiga, yang netral, adil, bijaksana dan tegas dalam mengambil keputusan, maka sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Tidak hanya itu saja, tidak adanya komunikasi dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Konflik akan menjadi sulit untuk diatasi ketika aspirasi masing-masing pihak menjadi kaku dan semakin menetap (Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2009: 9). Kakunya aspirasi dari kedua belah pihak yang berkonflik mempertegang hubungan antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk menemui kesepakatan bersama. Sebenarnya konsensus dapat diupayakan jika mereka mau duduk bersama dan berkompromi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam masalah ini.

Masing-masing pihak saling memperkuat pendapatnya, dari pihak petani atau warga Desa Setrojenar mengatakan bahwa mereka memiliki bukti berupa Leter C desa, itu sebagai bukti kepemilikan tanah desa. Sedangkan pihak TNI juga sama, yaitu memiliki bukti berupa SHNo 4/1994, Keppres No 4/1960 tentang semua rampasan perang yang dikuasai Negara dan dibagi-bagi sesuai tempatnya, serta surat ijin dari Bupati untuk melakukan latihan di kawasan Desa

Setrojenar. TNI juga tidak mau kalah mengklaim bahwa tanah sepanjang pantai itu sebagai tanah negara yang diperuntukkan bagi lahan latihan pertahanan dan keamanan TNI Angkatan Darat.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah dengan membentuk pansus, hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Sg, bahwa:

“Pihak pemerintah daerah pada saat itu membentuk pansus untuk menyelesaikan masalah ini. Pansus tersebut terdiri dari 9 orang mbak, tetapi masing-masing memiliki pendapatnya sendiri, ada yang pro dan ada yang kontra dengan masalah ini.” (wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 11.45 WIB).

Dari pemerintah desa sendiri sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini, seperti hasil wawancara dengan bapak Sp, bahwa:

“Saya sendiri selaku kepala desa disini sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah desa merupakan perwakilan dari rakyat mbak, jadi kami mendatangi Bupati dan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini, tapi belum ada keputusan yang tepat, sampai sekarang masih diproses terus mbak.” (Wawancara pada tanggal 9 Mei 2012, pukul 15.00 WIB).

Cara penyelesaian konflik ini memang sangat sulit, harus ada pihak ketiga yang menangani masalah ini. Pihak ketiga ini harus benar-benar netral, bijaksana, dan tegas, sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Seperti yang disebutkan, menurut Soerjono Soekanto tentang cara penyelesaian konflik yaitu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pihak ketiga, pihak ketiga harus melakukan beberapa langkah seperti, arbitrase (*arbitration*) dimana pihak ketiga mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak,

yang kedua mediasi (*mediation*), mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mencari jalan untuk memecahkan masalah secara terpadu dalam artian sesuai dan tepat sehingga masing-masing mau menerima keputusan tersebut.

Upaya sudah dilakukan yaitu dengan *mediation* dimana pihak yang menjadi penengah adalah pemerintah daerah kebumen dengan membentuk pansus, tetapi belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pembentukan pansus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ini. Dilihat dari hasil wawancara saya dengan masyarakat, bahwa masyarakat Desa Setrojenar lebih menginginkan tempat latihan dipindah tidak di daerah Desa Setrojenar tetapi mencari daerah yang luas untuk latihan militer dan uji coba senjata. Dapat dikatakan bahwa penanganan konflik ini, dari pihak pemerintah dan institusi terkait baik dari daerah maupun pusat masih lambat dalam menangani masalah tersebut, sehingga tidak ada titik temu yang tepat.

#### **d. Dampak yang terjadi Setelah Konflik**

Dengan terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI telah berdampak besar bagi kedua belah pihak yang telah berkonflik. Dampak tersebut bisa berdampak positif maupun berdampak negatif. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut:

### 1) Dampak Positif

Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Fisher, et. al., 2001: 4). Menurut Coser (dalam Johnson, 1994: 196) konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini. Dampak positif yang terjadi akibat terjadi konflik ini adalah:

(a) Bertambahnya solidaritas *in-group*

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar telah menjadikan dari masing-masing yang berkonflik memperkuat ikatan kesatuan dan persaudaraan diantara mereka. Menurut Coser (dalam Johnson, 1994: 196) kekuatan solidaritas internal dan intergrasi kelompok dalam akan bertambah tinggi karena tingkat permusuhan dan konflik dengan kelompok luar bertambah besar.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI, menjadikan masyarakat desa tersebut ikatan kesatuan dan solidaritasnya semakin kuat. Hal ini terlihat pada saat warga Desa Setrojenar dimasukkan kedalam penjara karena

dianggap bersalah masyarakat Desa Setrojenar secara bersama-sama selalu datang dalam persidangan dan selalu membela anggota masyarakatnya yang dianggap bersalah. Seperti yang diungkapkan oleh Mas An sebagai berikut:

“Kesatuan dan solidaritas yang ada pada warga masyarakat desa Setrojenar menjadi semakin kuat akibat konflik. Saat konflik terjadi, mereka secara bersama-sama mempertahankan blokade yang dibuat dan mempertahankan hak milik mereka yaitu tanah mereka yang memang benar-benar milik mereka. Sekarang ini masyarakat menjadi berani untuk mempertahankan haknya sebelumnya masyarakat belum berani setelah masalah ini muncul masyarakat menjadi berani untuk mempertahankan hak yang memang menjadi miliknya.” (Wawancara pada tanggal 12 Mei 2012, pukul 16.30 WIB)

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pr: “Persatuan masyarakat Desa Setrojenar semakin kuat dan berani dulu masyarakat belum berani sekarang dengan munculnya kejadian ini masyarakat menjadi berani. Pada saat beberapa warga disini dipenjara dan akan disidang masyarakat Desa Setrojenar secara bersama-sama datang untuk memberi dukungan terhadap mereka yang dijadikan tersangka mbak”. (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2012, pukul 10.24 WIB). Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat menjadi lebih berani lagi untuk mengungkapkan apa yang menjadi hak dan keinginannya. Tidak hanya itu saja, solidaritas ada masyarakat menjadi kuat setelah terjadinya konflik pada bulan April.

Solidaritas *in-group* muncul dan semakin kuat karena mereka merasa memiliki kesusahan dan kepentingan yang sama yaitu, lahan pertanian dijadikan sebagai lahan untuk latihan militer. Sehingga masyarakat bersatu untuk mempertahankan lahan pertanian yang memang menjadi hak milik mereka.

(b) Membuat berbagai pihak menyadari ada banyak masalah

Terjadinya konflik (2002-2011) telah membuat berbagai pihak memikirkan bagaimana cara untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI membawa dampak yang sangat besar, yaitu jatuhnya korban manusia dan rusaknya motor. Masyarakat desa Setrojenar sangat berharap konflik tersebut dapat terselesaikan dan mencapai kesepakatan diantara pihak yang berkonflik agar tidak terjadi bentrokan lagi antara masyarakat dengan TNI. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Im, sebagai berikut: “kami berharap masalah ini dapat terselesaikan, agar kami tahu bagaimana hak kepemilikan tanah disini dan tidak terjadi bentrok lagi.”

Konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar menyadarkan berbagai pihak bahwa ada banyak masalah yang sebelumnya tidak diketahui. Saling introspeksi diri antara kedua belah pihak bagaimana upaya yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi bentrok untuk

kedua kalinya. Kedua belah pihak menyadari bahwa perlu adanya upaya penyelesaian yang tepat agar masalah tersebut dapat terselesaikan.

## **2) Dampak negatif**

Konflik yang terjadi di Desa Setrojenar, selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Adanya dampak negatif akibat konflik ini adalah sebagai berikut:

### **(a) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban**

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan pasti akan menimbulkan kerugian, baik secara materi berupa rusaknya sepeda motor maupun jiwa-raga manusia. Konflik antara masyarakat dengan TNI terjadi beberapa hari dan memuncak pada tanggal 16 April 2011. Setelah terjadi konflik pada tanggal 16 April 2011, membawa dampak kerugian baik itu materi maupun non materi bagi masyarakat. Berikut ini para korban yang terkena pukulan, serta tembak dari TNI:

**Tabel 4. Daftar para korban pada saat konflik terjadi pada tanggal 16-17 April 2011**

| No | Nama                   | Asal               | Mulai Dirawat | Luka yang diderita   |
|----|------------------------|--------------------|---------------|--|
| 1. | Samsudin (28 th)       | Setrojenar         | 16 April      | Luka memar pada bagian punggung kanan, luka robek kepala kanan atas karena dipoor senjata. |
| 2. | Kusriyanto (29 th)     | Setrojenar         | 16 April      | Bagian pantat sebelah kanan terkena peluru.  |
| 3. | Mustofa (65 th)        | Setrojenar         | 16 April      | Luka memar dan mata kiri bengkak karena kepala dan wajah diinjak-injak tentara.            |
| 4. | Surip Supangat (38 th) | Setrojenar         | 16 April      | Ditembak pada bagian tangan dan pantat.  |
| 5. | Sarwadi (29 th)        | Setrojenar         | 16 April      | Ditembak pada paha kanan atas.   |
| 6. | Aris Panji             | Divisi Litbang FKS | 16 April      | Pelipis kanan robek, mulut robek.  |
| 7. | Mulyanto (21 th)       | Setrojenar         | 16 April      | Ditembak bagian punggung.  |
| 8. | Ilyas (35 th)          | Setrojenar         | 16 April      | Ditembak dipunggung kiri.  |
| 9. | Kasantri (19 th)       | Setrojenar         | 16 April      | Patah tulang kaki kiri, dipukuli tentara dengan poor dan pentungan.                        |
| 10 | Martijo (37 th)        | Setrojenar         | 16 April      | Ditembak ditangan kanan.   |
| 11 | Bajuri                 | Setrojenar         | 17 April      | Paha kanan terkena pantulan peluru, kepala bagian belakang sakit karena dipoor senjata.    |
| 12 | Ahyadi                 | Setrojenar         | 17 April      | Memar punggung dan leher   |
| 13 | Samirin                | Setrojenar         | 17 April      | Memar paha, betis punggung.  |
| 14 | Sarmo                  | Setrojenar         | 17 April      | Memar paha, betis punggung.  |

Sumber: bapak Sp selaku Kepala Desa Setrojenar

Rata-rata korban itu tidak tahu apa-apa, jadi mereka sedang melakukan kegiatan seperti biasa yaitu di sawah. Tiba-tiba TNI melakukan penembakan terhadap masyarakat yang sedang di sawah tersebut.

Sepeda motor yang dirusak oleh TNI terhadap motor masyarakat

**Tabel 5. Sepeda motor masyarakat yang dirusak oleh TNI**

| No  | Jenis          | Nomor Polisi |
|-----|----------------|--------------|
| 1.  | RX – KING      | AB 4528      |
| 2.  | YAMAHA FIZR    | AA 5731 AM   |
| 3.  | SUPRA X        | AA 3796 CM   |
| 4.  | YAMAHA JUPITER | AA 2978 RW   |
| 5.  | YAMAHA FIZR    | 6119 NS      |
| 6.  | JUPITER Z      | -            |
| 7.  | SUPRA FIT      | AA 3746 CW   |
| 8.  | KAWASAKI NINJA | B 4900 I     |
| 9.  | SUPRA X 125    | AA 4852 W    |
| 10. | HONDA WIN      | AA 9704 HD   |
| 11. | SHOGUN 125     | R 6082 RH    |
| 12. | SMASH          | AA 2677 NM   |

Sumber: bapak Sp selaku Kepala Desa Setrojenar

b) Membawa dampak pada Psikologis

Konflik yang terjadi pada tanggal 16 April 2011 berdampak besar terhadap kondisi psikologis warga, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka merasa takut dan trauma akibat konflik tersebut, seperti yang dikatakan Mas An: “Anak-anak juga sempat trauma dengan kejadian

tersebut. Malah ketika ngliat TNI anak-anak langsung lari dan bilang ke orang tuanya kalau ada TNI mbak. Pokoknya anak-anak merasa takut mbak kalau ada TNI”. (Wawancara pada tanggal 12 Mei 2012, 16.30 WIB).

Dengan kejadian tersebut warga mengalami trauma yang mendalam. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa juga turut menjadi korban. Penyisiran yang dilakukan oleh TNI ternyata berdampak bagi kondisi mental mereka. Sampai sekarang beberapa diantaranya merasa takut bila melihat sosok TNI. Anggapan ini diperkuat dengan perkataan bapak Nr sebagai berikut: “Masyarakat trauma dengan adanya sikap brutal dari TNI, terutama anak-anak dan perempuan mbak.”

c) Hubungan interaksi dan komunikasi menjadi terganggu

Dampak konflik yang terjadi antara masyarakat dengan TNI sangatlah besar. Bukan hanya bersifat material maupun bersifat non material. Komunikasi dan interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan TNI setelah terjadi konflik semakin memburuk dan menjadi tidak harmonis.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Nr:

“Hubungan dengan TNI kurang harmonis apalagi dengan anggota litbang yang bertugas mbak. Kalau saya lihat anggota TNI kaya ketakutan, sekarang jarang menampakan diri misalnya kumpul-kumpul dengan masyarakat. Ada juga mbak yang minta

pindah kerjanya tidak di litbang lagi, ada juga yang pindah seolah-olah kaya menghindar dengan masyarakat mbak.” (wawancara pada tanggal 31 Mei 2012, pukul 11.35 WIB).

Tanggapan tersebut diperkuat lagi oleh tanggapan bapak Sg sebagai berikut: “Saya akui mbak kalau saya pribadi memang tidak suka dengan sikap TNI setelah kejadian ini. Anggapan masyarakat tentang TNI dulu seperti dewa sekarang tidak percaya lagi dengan TNI.” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2012, pada pukul 12.20 WIB).

Pihak TNI juga merasakan hal yang sama, seperti yang dikatakan oleh bapak Mt, sebagai berikut: “hubungan kami dengan warga disini setelah terjadi bentrokan kemarin itu memang menjadi tidak harmonis lagi mbak. Mungkin karena masyarakat merasa sakit hati dengan sikap kami sehingga masyarakat sini menjadi tidak ramah dengan kami.” (Wawancara pada tanggal 7 juli 2012, pada pukul 10.30 WIB).

### C. Pokok Temuan Penelitian

Pokok temuan dalam penelitian mengenai konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI berupa faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern dari penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI adalah a) Status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas, b) Tanaman milik masyarakat rusak akibat latihan militer, c) Perbedaan tujuan dalam pemanfaatan lahan. Sedangkan faktor ekstern penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI adalah adanya kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemerintah Daerah Kebumen.

2. Konflik yang terjadi antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI merupakan konflik terbuka yang bersifat vertikal.

Konflik yang terjadi dalam perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI merupakan konflik terbuka. Konflik tersebut berakar dalam dan nyata, sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk menyelesaikannya. Konflik tersebut merupakan konflik yang bersifat vertikal. Karena konflik tersebut terjadi antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI. Dimana masing-masing memiliki kepentingan dan memiliki kedudukan yang berbeda atau tidak sederajat. TNI lebih memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang

hanya rakyat biasa.

3. Solusi/ Upaya Penyelesaian dalam menangani konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI.

a. Dari Pemerintah

Solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang terkait serta membentuk pansus untuk menyelidiki masalah tersebut tetapi belum ada titik temu yang tepat.

b. Masyarakat

Solusi yang dilakukan oleh masyarakat sudah berkali-kali dilakukan yaitu dengan melakukan dialog dengan pemerintah dan pihak TNI ada kesepakatan dimana TNI tidak boleh melakukan latihan sebelum ada kejelasan mengenai masalah tersebut. Tetapi pihak TNI tetap saja memaksa untuk melakukan latihan uji coba senjata.

Warga desa Setrojenar sudah sering melakukan demo untuk mengeluarkan aspirasi kepada pemerintah daerah atas latihan militer yang dilakukan oleh TNI serta meminta kejelasan terhadap tanah yang memang benar-benar milik masyarakat tersebut. Tetapi aksi tersebut tidak di dengar oleh pemerintah daerah. masyarakat melakkan aksi demo mendapat dukungan dari LBH Phakis Kebumen, LBH Yapi Solo, PMII Kebumen. Lembaga inilah yang membantu masyarakat mengeluarkan aspirasinya serta membantu masyarakat

ketika beberapa warga Desa Setrojenar ada yang dipenjara.

4. Solidaritas atau persaudaraan masyarakat Desa Setrojenar semakin kuat setelah terjadinya konflik.
5. Kondisi sosial warga Desa Setrojenar setelah terjadi konflik semakin maju karena tidak ada lagi latihan militer di daerah Setrojenar dan warga bisa melakukan kegiatan pertanian dengan bebas dan nyaman.
6. Pada tanggal 16 April 2012, diadakan perhelatan untuk mengenang satu “Setahun Tragedi Setrojenar”.